

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintah desa.

Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat

diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, internet maupun ketersediaan SDM TIK yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.¹

Banyak desa yang mengalami ketertinggalan informasi yang sangat besar jika dibandingkan dengan perkotaan karena masalah teknologi informatika dan komunikasi (TIK). Walaupun banyak isu dan tantangan dalam paradigma pembangunan kelembagaan pedesaan dengan menentukan teknologi yang sudah mulai memasuki pola dan sistem pemerintahan dan pengembangan masyarakat pedesaan memiliki banyak kelemahan. Termasuk adopsi TIK oleh pemerintah di tingkat desa yang kerap dipandang masyarakat lamban sehingga muncul berbagai kasus yang menyebabkan TIK dipandang sebagai hal yang negatif dan tidak cocok untuk masyarakat, akan tetapi mulai perlahan timbul kesadaran di dalam pemerintah dan masyarakat bahwa TIK bukanlah musuh yang harus dihindari namun ia merupakan alat yang sangat efektif dan efisien dalam berbagai hal terkait dengan pelayanan publik.

Inilah yang mendasari gagasan dan inisiatif dari pemerintah dan masyarakat tingkat desa dan kota sebagai intelektual yang peduli terhadap dampak TIK untuk masyarakat khususnya yang berada di tingkat desa untuk menerapkan TIK dalam peri kehidupan dan berekonomi politik, tidak hanya sebatas koneksi individual yang diwujudkan dalam bentuk koneksi internet di telepon selular anak anak muda di desa yang semakin marak. Saat ini, upaya tersebut mendapatkan

¹Didit Praditya. 2014. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 17 No.2, Desember 2014: 129-140. Bandung: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)

dukungan penuh dari sisi kelembagaan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa, SID berisi informasi yang meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Undang-Undang Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa beserta semua pemangku kepentingan.³

Dengan adanya Undang-Undang Desa tersebut, dana yang sudah diturunkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap desa maka diharapkan dana tersebut dapat diserap oleh desa untuk memenuhi kebutuhan pemerintahannya. Kabupaten Wonogiri memiliki 25 kecamatan dan memiliki 294 kelurahan/desa.⁴

Dana desa tahap I yang bersumber dari APBN untuk desa di Wonogiri senilai Rp 93 miliar sudah ditransfer ke kas daerah sejak 19 April lalu. Sebanyak 31 desa sudah menerima dana desa setelah pengajuan pencairan dinyatakan memenuhi persyaratan. Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Wonogiri, Bapak Sriyanto menyampaikan:⁵

²Unggul Sagena. Gerakan Desa (Berbasis) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tantangannya di Kelembagaan Desa Era Baru. *Jurnal Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD)*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

³Nunik Maharani Hartoyo dan Ika Merdekawati 2016. Upaya Membangun Sistem Informasi Desa. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol 01 hal: 48-57. Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

⁴Godam. 2011. *Daftar Nama Kecamatan, Kelurahan dan Kodepos di Kabupaten Wonogiri*. <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-wonogiri-jawa-tengah-jateng.html> diakses pada tanggal 10/11/2016 pukul 10:34 WIB

⁵Rudi Hartono. 2016. *Dana Desa Wonogiri-31 Desa Sudah Terima Dana Desa*. <http://www.solopos.com/2016/05/05/dana-desa-wonogiri-31-desa-sudah-terima-dana-desa-716839> diakses pada tanggal 10/11/2016 pukul 11:19 WIB

“Dana desa tahap I yang ditransfer ke kas daerah 60 persen dari total dana desa yang dialokasikan untuk Wonogiri senilai Rp 155 miliar. Dana desa tersebut akan ditransfer ke kas desa atas pengajuan masing-masing desa. Setelah dana desa ditransfer ke kas daerah bagian Pemdes langsung akan menginformasikan ke seluruh desa yang berjumlah 251 desa. Hingga pekan lalu bagian Pemdes menerima pengajuan pencairan dari 66 desa. Sebanyak 31 dokumen pengajuan sudah diserahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak akhir pekan bulan April.”

Desa Sendang adalah salah satu desa yang menerima dana desa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan adanya dana desa tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan juga melengkapi sarana serta prasarana yang ada di desa tersebut agar bisa memajukan, memakmurkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Letidak Desa Sendang sangatlah strategis karena berada tepat di badan jalan provinsi Jawa Tengah-Jawa Timur-DIY dan desa ini juga terletak bersebrangan tepat dengan salah satu lokasi pariwisata terkenal di Kabupaten Wonogiri, yaitu Wisata Waduk Gajah Mungkur, desa ini telah menerima dana desa pada bulan April 2016 namun hingga saat ini dana tersebut tidak dialokasikan untuk bidang pengembangan sistem informasi desanya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Desa bagian ketiga Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:⁶

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi

Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

⁶UU Desa. hlm: 48-49

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Desa Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dari penjelasan diatas yaitu pada pasal (1) dan (2) bahwa desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Diketahui pula bahwa sistem informasi sangatlah penting dalam sebuah desa. Sistem informasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya *website*. *Website* merupakan salah satu bagian dari *E-Government*. Di Indonesia proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *E-Government*, yaitu yang pertama adalah penggunaan teknologi

informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efisien.⁷

Dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri dan faktor apa saja yang menjadi hambatan desa tersebut untuk mewujudkan dan menjalankan sistem informasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri.

⁷Edwi Arief Sosiawan. 2008. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adapun untuk menambah referensi tentang desa khususnya terkait dengan hal sistem informasi desa untuk program studi Ilmu Pemerintahan UMY khususnya dan untuk seluruh pembaca penelitian ini.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri dalam pengimplementasian undang-undang yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah suatu uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Untuk melakukan suatu penelitian ada unsur yang sangat penting yaitu teori, karena teori mempunyai peranan dalam menjelaskan apa yang ada di dalam permasalahan yang akan dicari pada suatu pemecahan masalah atau solusi.⁸

Secara sederhana penulis mengatidakan bahwa teori merupakan rangkaian pendapat yang dapat menjadi penjelasan suatu penelitian. Adapun kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 *E-Government*

E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan

⁸Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi *E-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana, yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik.⁹

Menurut Cahyana Ahmadjayadi dalam *keynote speech* acara Workshop Standarisasi menuju Interoperabilitas *E-Government* tahun 2006, menerangkan bahwa *E-Government* merupakan kegiatan yang terkait dengan upaya seluruh lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat kepada individu masyarakat dan dunia usaha. Inisiatif *E-Government* adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisien bagi publik.¹⁰

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan

⁹Nia Karniawati & Romi Rahmadani. Analisis Kebijakan Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) (Suatu Studi pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol.7 No.2. hlm: 233. Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM

¹⁰Didi Sukyadi. 2009. Model Interoperabilitas Sistem Informasi Layanan Publik Studi Kasus: *E-Government*. *Tesis Ilmu Komputer*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm: 5

pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Banyak negara besar yang telah mengimplementasikan konsep *E-Government* diantaranya yaitu Amerika dan Inggris melalui Al-Gore dan Tony Blair (dalam Indrajit 2002:4), telah secara jelas dan merinci manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:¹²

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.

¹¹Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. hlm: 6

¹²Siti Mutia Nurcahyani Liputo. 2015. Penerapan *E-Government* Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Skripsi Administrasi Negara*. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm: 21

- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

1.5.2 Sistem Informasi Desa

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi yang terdiri dari komponen di atas disebut dengan istilah blok bangunan (*building block*), yaitu blok masukan (*input block*), blok model (*model block*), blok keluaran (*output block*), blok teknologi (*technology block*),

dan blok kendali (*control block*). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya.¹³

Suatu sistem informasi pasti memiliki berbagai informasi terkait dengan tempat, data, manusia dan berbagai hal yang ada disekitar lingkungan kita. Informasi itu sendiri tersusun dari beberapa data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang memiliki sebuah arti dan terkadang suatu informasi dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk pengambilan suatu keputusan.¹⁴

Dalam pengertian yang lain sistem informasi diartikan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.¹⁵

Terdapat tiga unsur di dalam sebuah sistem informasi, diantaranya sebagai berikut:¹⁶

a. Masukan (*Input*)

Input merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memasukan data-data yang masih mentah dari berbagai macam sumber.

¹³Dwi Priyanti dan Siska Iriani. 2013. Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 2 No. 4. Jakarta: APPMI. hal: 56

¹⁴Djoko Sutono. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. hlm: 7

¹⁵Tata Sutabri. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi. hlm: 36

¹⁶Djoko, op.cit., hlm: 8

b. Pemrosesan (*Processing*)

Dalam tahap proses ini, data-data yang masih mentah tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian dilakukan berbagai proses perubahan-perubahan yang digabungkan hingga menjadi satu sehingga data-data tersebut memiliki suatu arti tertentu.

c. Keluaran (*Output*)

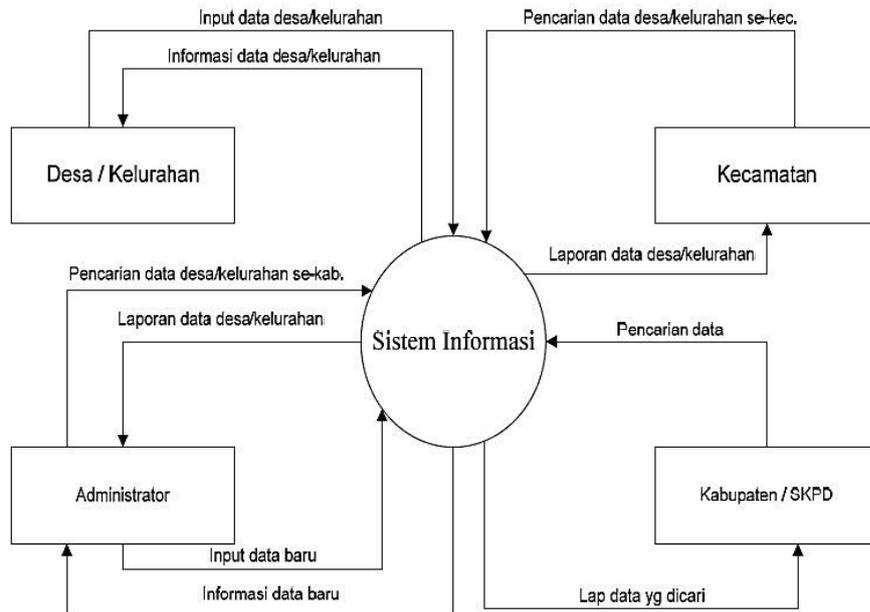
Keluaran yang dimaksud disini yaitu penyampaian-penyampaian atas informasi yang berupa data mentah hingga menjadi informasi yang memiliki sebuah arti/makna kepada pihak yang akan menggunakan/membutuhkan informasi tersebut.

Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatidakan sebagai suatu sistem.

Berikut ini adalah bagan konteks perencanaan sebuah sistem yang berada pada tatanan sebuah pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Hartono, op.cit., hal. 17

Bagan 1 Diagram Konteks Perencanaan Sistem



Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung dan untuk media menginformasikan suatu organisasi struktural yang berada di tingkat desa dalam mengelola potensi-potensi yang ada di suatu desa tersebut. Sistem informasi desa ini pula terdiri dari bagian-bagian yang berbasis teknologi terkini yang dapat dikelola dengan mudah oleh lapisan-lapisan masyarakat di suatu desa. Dinamakan sistem informasi karena berisikan beberapa konten-konten yang menjadi bahan utama suatu informasi. Wadah dari konten-konten tersebut biasanya berbentuk *database* dari berbagai aplikasi yang ada pada sistem komputer. Dengan adanya sistem-sistem yang ada di komputer atau yang sering disebut dengan perangkat lunak inilah kedepannya akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi struktural terkait dengan pengelolaan potensi-potensi

yang ada dan dalam hal memberikan pelayanan publik akan dapat lebih efisien, efektif, cepat, dan akurat.¹⁸

1.5.3 Pemerintahan Desa

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:¹⁹

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” maka menjadi pemerintahan yang mana ini berarti perbuatan, cara, hal atau urusan hal dari badan yang memerintah tersebut.

Dalam pengertian lain, pemerintahan juga dapat diartikan sebagai alat kelengkapan dalam sebuah organisasi di suatu negara. Pemerintahan memiliki arti statis dan dinamis. Statis merupakan lingkungan yang berisi sederet pekerjaan yang tetap, sedangkan dinamis merupakan suatu proses atau aktivitas untuk menjalankan sebuah kekuasaan di pemerintahan.²⁰

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

¹⁸Elanto Wijoyono dan Akhmad Nasir. 2013. *FDG: Lisensi Aplikasi dan Legalitas Manajemen Isi SID*. <http://lumbang.combine.or.id/2013/06/20130605-fgd-lisensi-aplikasi-dan-legalitas-manajemen-isi-sid/> diakses pada tanggal 19/12/2016 pukul 16:47 WIB

¹⁹Inu KencanaSyafiie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju. hlm:4

²⁰Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: UNILS. hlm: 2-3 (dalam Skripsi Apriyatno, 2016: 12)

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Tujuan dari terbentuknya suatu desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.²²

Menurut Maria (2003:23) Pemerintahan Desa juga termasuk dalam Pemerintah Nasional, dimana memiliki Pemerintah Desa penyelenggaraannya berada di pedesaan. Pemerintahan desa merupakan proses dimana semua kebutuhan masyarakat dan kebutuhan serta usaha pemerintah berjalan beriringan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.²³

Tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 23-24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan beberapa asas, diantaranya sebagai berikut:²⁴

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Kepastian Hukum | g. Akuntabilitas |
| b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan | h. Efektivitas Dan Efisiensi |
| c. Tertib Kepentingan Umum | i. Kearifan Lokal |
| d. Keterbukaan | j. Keberagaman |
| e. Proposionalitas | k. Partisipatif |
| f. Profesionalitas | |

²¹UU Desa. hlm: 2

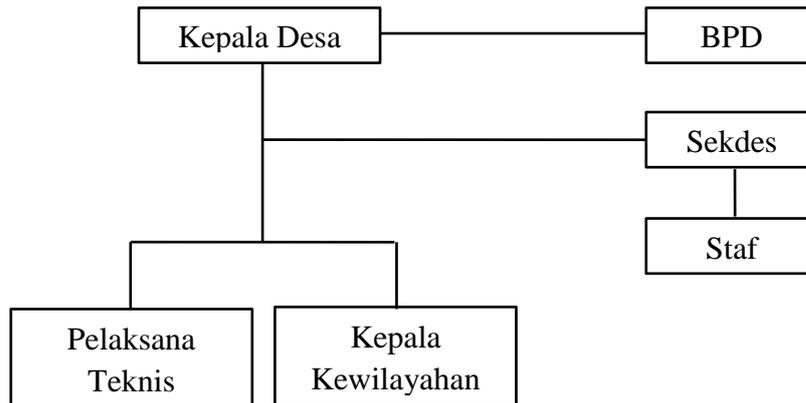
²²Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. hlm: 2

²³Maria Eni Surasih. 2003. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga. hlm: 23

²⁴UU Desa. hlm: 8-9

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁵

Bagan 2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

BPD berdedukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan terwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha atau administrasi yang benar, rapi dan tertib yang nantinya

²⁵Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. hlm: 73-79

akan berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, komunikasi dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi.²⁶

1.5.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi juga bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁷

Implementasi erat dikaitkan dengan suatu kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan suatu kegiatan yang mana ditujukan pada suatu program. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih oleh untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang karena kebijakan itu (*a standing*

²⁶Ibid., hlm: 135-136

²⁷Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasido. hlm: 170

²⁸Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. hlm: 56

*decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).*²⁹

Menurut Abdul Wahab (1997:53) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.³⁰

Menurut Abidin (2004: 191) implementasi kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:³¹

- a. Internal, yang meliputi:
 - 1.) Kebijakan yang akan dilaksanakan
 - 2.) Faktor-faktor pendukung
- b. Eksternal
 - 1.) Kondisi lingkungan
 - 2.) Pihak-pihak terkait

Abidin juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistik atau dari atas ke bawah (apa yang dilaksanakan adalah apa yang diputuskan). Selain itu

²⁹Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press. hlm: 12

³⁰Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta. hlm: 55

³¹Ibid., hlm:57

Abidin juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 pendekatan, diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan struktural
- b. Pendekatan prosedural
- c. Pendekatan kejiwaan
- d. Pendekatan politik

Sehubungan dengan itu, maka secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1994). Wibawa juga menjelaskan bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.³²

1.5.5 Implementasi Sistem Informasi Desa

Implementasi sistem informasi desa merupakan suatu proses pengelolaan suatu sistem yang mana mengandung informasi-informasi tentang suatu desa, mulai dari dasar hukum pemerintahan desa, wisata, potensi-potensi produk unggulan maupun pelayanan publik yang dapat diakses secara online melalui suatu situs yang dapat disebut dengan website.

³²Ibid., hal: 58

Menurut Heeks (2001) keberhasilan dan kegagalan dari suatu sistem informasi elektronik berkaitan dengan berbagai indikator, diantaranya adalah sebagai berikut ini:³³

1. Infrastruktur hukum. Dimana suatu perangkat hukum digunakan untuk mencegah suatu kejahatan digital, melindungi sebuah data pribadi maupun melindungi keamanan suatu informasi dan transaksi perorangan, perusahaan maupun lembaga pemerintah.
2. Infrastruktur kelembagaan. Pada sebuah kelembagaan, untuk menggarap dan memberikan layanan informasinya maka sebuah sistem harus memiliki instansi khusus. Sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
3. Infrastruktur Sumber Daya Manusia. Sistem kepegawaian perlu sangat dikembangkan agar dapat menarik sumber daya manusia berkualitas yang profesional dalam bidang telematika untuk ikut berperan dalam pengelolaan suatu sistem informasi yang dijalankan pemerintah.
4. Infrastruktur teknologi. Teknologi yang digunakan memang relatif mahal, namun dalam hal ini selain dapat kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga harus melakukan perawatan dan pengadaan barang-barang baru agar teknologi yang dimiliki dapat mendukung berjalannya sistem tersebut.
5. *Support, Capacity, Value.*

³³Hartono, dkk. 2010. *E-Government* Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol 6. No 1. Semarang: Pascasarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. hlm: 16

6. *Political environment, Leadership, Planning, Stidakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation.*

Menurut Stair dan Reynolds (2006) kelengkapan alat-alat telekomunikasi penunjang suatu sistem informasi yaitu terdiri dari *hardware, software, storage*, dan jaringan.³⁴

Penjelasan terkait penunjang telekomunikasi diatas adalah sebagai berikut: *Hardware*/perangkat keras yang merupakan alat yang digunakan untuk penunjang dalam membuat dan mengelola website, yaitu:

- a. Monitor
- b. CPU
- c. Keyboard
- d. *Hardisk*, sebagai media penyimpanan untuk *memback-up* data

Software/perangkat lunak yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat website, yaitu:³⁵

- a. *Xampp*, sebagai server yang berdiri sendiri (*localhost*) yang terdiri dari program Apache HTTP Server, MySQL *database* dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.

³⁴*Pengertian Infrastruktur dan Contohnya.* <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-infrastruktur-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 14/08/2017 pukul 12:23 WIB

³⁵ 2015. *Software yang Digunakan untuk Membuat Website.* <http://xbulan.co.id/2015/08/software-yang-diperlukan-untuk-membuat.html> diakses pada tanggal 14/08/2017 pukul 19:38 WIB.

- b. *Filezilla*, sebagai perangkat yang berbasis *open source* yang digunakan untuk melakukan transfer data dari dan ke akun *web hosting*.
- c. Photoshop dan Corel Draw, sebagai aplikasi untuk membuat desain grafis sebuah gambar/tulisan.
- d. *Dreamweaver*, sebagai aplikasi untuk membuat tema.
- e. Putty, sebagai aplikasi untuk login *source shell/SSH* (protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antarmuka baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer).
- f. *Firefox Web Developer*, sebagai *browser* yang mana dapat digunakan untuk mengontrol dan terdapat pemberitahuan/peringatan apabila ada HTML dari sebuah website yang dianggap eror.
- g. *Pagespeed Insight*, sebagai aplikasi online milik google untuk menguji kecepatan suatu website.
- h. *Responsive Design*, sebagai alat pengecekan apakah website sudah responsif (*compatible* di semua layar) atau belum.

Storage/tempat penyimpanan data-data yang berupa file dan bukan berupa *print out* dalam suatu website, diantaranya:³⁶

- a. *Local storage*, merupakan fungsi di *javascript* yang cara kerjanya sama seperti *cookie* (data disimpan dalam browser) namun memiliki beberapa kelebihan. *Local storage* dapat menyimpan data

³⁶Agus. 2017. *Menggunakan Local Storage dan Session Storage*. <https://mragus.com> diakses pada tanggal 14/08/2017 pukul 19:00 WIB.

lebih aman dan lebih besar dibandingkan dengan *cookie*. *Local storage* juga dapat menyimpan data lebih dari 5 MB tanpa harus membebani performa browser. Banyak hal yang bisa dilakukan saat membangun aplikasi web dengan menggunakan fungsi ini dan dapat mempermudah dalam membuat atau membangun sebuah website yang lebih responsif.

- b. *Session Storage*, fungsinya masih sama dengan *local storage*, namun sebelumnya perlu mengatur *key and value*. Selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam berbagai kasus yang mengkombinasikan dengan *Jquery*.

Perbedaan antara *Local Storage* dan *Session Storage*, yaitu:

- a. *Local Storage* merupakan data yang disimpan tidak memiliki waktu expired.
- b. *Session Storage* merupakan data yang disimpan akan hilang jika browser ditutup.

Adapun manfaat dari penggunaan SID apabila diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut:³⁷

1. Pemerintah desa lebih efisien

Dengan penggunaan SID tersebut, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warganya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara manual, dengan SID ini data penduduk

³⁷Eddie Ridwan. 2016. *Peran dan Manfaat Sistem Informasi Desa*. <https://github.com/eddieridwan/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa> diakses pada tanggal 19/12/2016 pukul 16:53 WIB

yang sebelumnya sudah tersimpan dapat diisi secara otomatis dan dapat langsung dicetak tanpa menunggu hari berikutnya seperti dengan menggunakan cara manual yang relatif memakan waktu hingga sehari-hari.

2. Pemerintah desa lebih efektif

Karena SID dapat menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa menargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, dimana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.

3. Pemerintah desa lebih transparan

Pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di *website* desa, papan pengumuman, dsbnya.

4. Pemerintah desa lebih akuntabel

Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desadan sebagainya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah

membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, penggunaan dana desa, dsbnya.

5. Layanan publik yang lebih baik

SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

6. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa

Dengan SID, informasi kependudukan, perencanaan, aset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di *website* desa. Karena mengetahui data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

7. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa

Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan mengetahui kegiatan apa yang sedang berjalan dan

apa yang sedang direncanakan, sehingga warga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.

1.5.6 Kegagalan Implementasi

Tidak semua implementasi kebijakan yang dirancang oleh eksekutif dapat diimplementasikan sesuai dengan rancangan. Hogwood dan Gunn telah membagi 2 pengertian tentang kegagalan kebijakan dalam 2 kategori, diantaranya:

- a. *Non implementation* (tidak diimplementasikan), merupakan suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan, terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu, beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama; mereka telah bekerja namun kinerjanya tidak efisien; bekerja setengah hati; tidak sepenuhnya para aktor menguasai permasalahan atau persoalan tersebut dikerjakan diluar dari jangkauan kekuasaannya, sehingga seberapa besar usaha yang dilakukan, kegagalan implementasi nantinya tidak akan dapat ditangani.
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), merupakan kebijakan yang sudah diimplementasikan sesuai dengan rencana namun terdapat faktor-faktor lain, seperti faktor eksternal

yang tidak menguntungkan kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil dalam mewujudkannya hingga berdampak pada hasil akhir yang telah dikehendaki. Hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:³⁸

- 1.) *Bad execution* (pelaksanaan yang buruk)
- 2.) *Bad policy* (kebijakan yang buruk)
- 3.) *Bad luck* (kebijakan yang bernasib jelek)
- 4.) Sejak proses perancangan, kebijakan tersebut sudah buruk. Buruk ini diartikan dengan perumusannya yang tidak serius, tidak dikudung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru ataupun banyaknya asumsi dan harapan yang tidak realistis.

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan di lapangan, Peter mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi faktor penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:³⁹

a. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai saran untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan efektif jika sekelompok orang yang bekerjasama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya

³⁸Abdul Aziz dan Humaizi. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Studi tentang Kegiatan Pusat Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Ilmu Komunikasi dan Informatika. Vol. 3 No. 1. Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm: 4-5

³⁹Ibid., hlm: 8

gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.

b. Isi kebijakan

Mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan publik yang dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Sehingga isi dari kebijakan publik ini harus jelas, tegas, dan mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholders*.

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan *intern* atau *ekstern* atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

Dukungan ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan. Dukungan yang disebutkan adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Jadi suatu program akan berlangsung berkelanjutan apabila partisipasi dukungan masyarakat tinggi dalam berbagai tahapan,

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi setiap program yang akan dikerjakan.

d. Pembagian potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai permasalahan atau gambaran yang lebih jelas mengenai batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Dalam tulisan ini, konseptual yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.6.1 *E-Government*

Layanan pemerintah berbasis teknologi elektronik yang mana media tersebut akan mendukung, mempermudah dan mempercepat proses dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan publik yang dapat berupa barang dan jasa.

1.6.2 Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa merupakan kumpulan data yang di input, kemudian di proses dan pada akhirnya di output oleh sebuah *user*/pengguna yang memuat banyak suatu pengetahuan. Dari keseluruhan, informasi dapat menjadi salah satu sumber dalam mengambil dan memutuskan suatu kebijakan. Informasi ini nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mengakses suatu data terkait informasi suatu wilayah khususnya wilayah desa.

1.6.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional, dimana pemerintahan desa ini memiliki payung hukumnya sendiri dan memiliki berbagai wewenang untuk mengatur segala pemerintahannya, kebutuhan dan menampung semua aspirasi masyarakat yang berada di desa tersebut.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas dari adanya penerapan suatu kegiatan yang mana sebelumnya telah dirancang dan disahkan, kemudian dilakukan oleh para aktor-aktor yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat.

1.6.5 Implementasi Sistem Informasi Desa

Implementasi sistem informas desa merupakan kegiatan dari adanya suatu kebijakan yang mana terkait dengan proses dan pengelolaan terhadap data-data yang ada di wilayah desa kemudian di proses hingga

menghasilkan output berupa informasi-informasi terkait dengan desa tersebut.

1.6.6 Kegagalan Implementasi

Kegagalan implementasi merupakan tidak berjalannya kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kegagalan implementasi ini dipengaruhi banyak faktor, biasanya kegagalan implementasi ini diawali dengan perencanaan yang tidak matang sehingga dalam proses implementasi mengalami banyak hambatan.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur penelitian yang terkait dengan variabel dalam suatu judul penelitian yang berguna sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Sistem Informasi Desa
 - a. Infrastruktur pendukung telekomunikasi
 - 1) Kelengkapan alat-alat telekomunikasi
 - 2) Pengadaan dan perawatan alat-alat telekomunikasi
 - 3) Kemudahan akses masyarakat
 - b. Tingkat konektivitas dan penggunaan IT
 - 1) Kestabilan jaringan dalam suatu daerah
 - 2) Tingkat penggunaan IT pada masyarakatnya
 - c. Sumber daya manusia
 - 1) Kualitas

- 2) Kuantitas
- d. Infrastruktur kelembagaan
 - 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
 - 2) Struktur organisasi pelaksana pelayanan publik
- 2. Kegagalan Implementasi Sistem Informasi Desa
 - a. Informasi
 - b. Isi kebijakan
 - c. Dukungan
 - 1) Dukungan dari Pemerintah Daerah
 - 2) Dukungan dari masyarakat
 - d. Pembagian potensi`

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Pada pengertian lain, yaitu merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip

wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pencarian untuk pemahaman, peneliti kualitatif tidak mereduksi halaman demi halaman dari narasi data lain ke dalam simbol-simbol numerik. Peneliti kualitatif mencoba menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya.⁴⁰

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

1.8.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait dengan permasalahan yang mampu memberikan informasi yang sesuai dengan variabel penelitian, data tersebut dapat diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi di Kantor Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri. Adapun data-data primer yang dibutuhkan dilapangan, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers. hlm: 3

Tabel 1
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Sosialisasi pada masyarakat terkait dengan dana desa dan media yang digunakan	a. Kepala Desa Sendang b. Sekertaris Desa Sendang c. Masyarakat	a. Wawancara b. Observasi
Sumber daya yang dimiliki pada Kantor Desa Sendang	a. Kepala Desa Sendang b. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang c. Masyarakat	a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi
Pemahaman pelaksana implementasi terhadap sebuah kebijakan	a. Kepala Desa Sendang b. Sekertaris Desa Sendang	a. Wawancara
Struktur organisasi dan pembagian kewenangan (SOP)	a. Kepala Desa Sendang b. Sekertaris Desa Sendang c. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang	a. Wawancara b. Dokumentasi

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kutipan terkait dengan semua informasi mengenai implementasi program sistem informasi desa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri tahun 2016 yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari sumber lain seperti arsip, internet, surat kabar dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Profil Desa Sendang	Arsip Desa Sendang	Dokumentasi
Struktur organisasi Desa Sendang	Arsip Desa Sendang	Dokumentasi
Rincian penggunaan anggaran dana desa	Arsip Desa Sendang	Dokumentasi
Rincian kecepatan akses jaringan di Kabupaten Wonogiri	Arsip Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri	Dokumentasi
Tingkat akses website pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten	Website Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri	Dokumentasi

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua orang yang sedang berhadapan dimana yang melakukan wawancara meminta informasi atau bertanya kepada narasumber.

b. Observasi

Observasi dibedakan dalam berbagai bentuk, yang mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Observasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, sehingga hasil dari penelitian tersebut penulis harus menyimpulkan sendiri informasi atau data yang didapat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi objek penelitian. Teknik ini

dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber lain yang relevan.

1.8.5 Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Sendang
- b. Sekretaris Desa Sendang
- c. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang
- d. Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri
- e. Masyarakat Desa Sendang

1.8.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data sehingga dapat ditangkap oleh pembaca dengan baik dan mudah. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif. Data yang diperoleh diklasifikasikan, digambar dengan kalimat, dipisah-pisahkan dengan mengkategorikan untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian menganalisa dengan objek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh.

Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian. Langkah yang perlu ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Analisa data dalam bentuk observasi terhadap objek penelitian dilapangan.
- b. Menemukan persamaan dan perbedaan masalah sosial yang diamati.
- c. Mengevaluasi proposisi sementara untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.